



**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
**UNIT KERJA** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BACHYUNI DELIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3. NHK : 198052

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.410.000.000

1. Tanah Seluas 1.228 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/61 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 40.777 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 100.095 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/160 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/99 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah Seluas 551 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 376.000.000

1. MOBIL, Honda HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 376.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 100.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 33.411.109

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.919.411.109

**III. HUTANG**

Rp. 348.749.645

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 3.570.661.464

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 September 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.